

BAB I

PENDAHULUAN

Pada Bab ini diuraikan latar belakang yang menjadi dasar dalam penelitian. Selain itu, diuraikan juga identifikasi penelitian, batasan penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, hingga manfaat penelitian secara teoritis maupun praktis.

A. Latar Belakang Masalah

Riuhnya puisi yang bertema kritik sosial dalam panggung sastra Indonesia hendaknya menjadi inspirasi untuk berbagai elemen bangsa dalam memperbaiki negeri ini. Hal ini senada dengan pendapat Nyoman Kutha Ratna (2005) bahwa kaitan antara sistem estetika dan sistem sosial tampak apabila karya sastra dilihat melalui dimensi-dimensi sosiokulturalnya. Artinya, karya sastra dianggap melalui manifestasi intensi-intensi struktur sosial tertentu, baik sebagai afirmasi (pengakuan), restorasi (pengembalian pada semula), dan inovasi (pembaruan), maupun negasi (pengingkaran). Melalui medium bahasa, karya sastra menampilkan ekspresi kolektivitas tertentu, sebagai pandangan dunia. Hal ini menjadi spirit penyajian refleksi melalui lorong sastra.

Sastra dan kehidupan tidak dapat dipisahkan. Sastra hidup karena ada kehidupan. Sastra merupakan guru efektif bagi penelusuran kehidupan sosial. Tentu saja, yang dimaksud kehidupan tidak saja sekadar kehidupan lahiriah, melainkan yang paling penting adalah kebutuhan batiniah. Sastra akan menjadi wahana pembangun batin, ikut menata kehidupan, dan memperjuangkan suasana sosial. Jika kehidupan sosial tidak lurus, sastra dapat menjadi salah satu media untuk meluruskan.

Melihat kondisi Indonesia beberapa tahun terakhir ini, korupsi menjadi salah satu masalah paling serius yang harus dihadapi negeri ini. Korupsi menjadi persoalan sosial yang sangat mengganggu pembangunan di Indonesia. Korupsi telah merambah keseluruhan aspek kehidupan bangsa Indonesia saat ini. Korupsi ibarat penyakit kronis yang terus merusak segala segi kehidupan

Nike Aditya Putri, 2018

REPRESENTASI PERMASALAHAN SOSIAL DALAM ANTOLOGI PUISI MENOLAK KORUPSI DAN PEMANFAATANNYA SEBAGAI BUKU PENGAYAAN SASTRA DI SMA

bangsa. Mulai dari pejabat negara sampai pejabat daerah berlomba-lomba untuk mendapat kekayaan secara salah dan merugikan rakyat. Lebih parahnya lagi, korupsi dianggap perbuatan biasa dan para koruptor tidak merasa bersalah kepada rakyat dan tidak pula merasa berdosa kepada Tuhan. Padahal korupsi adalah kejahatan yang dapat merusak bangsa. Pemberantasan korupsi bukanlah persoalan mudah di Indonesia sebab korupsi telah menjadi budaya yang telah berurat dan berakar dalam masyarakat Indonesia (Azra, 2002: 31-36).

Dilansir dari data *Transparency International* (TI) menemukan bahwa skor *Corruption Perception Index* (CPI) Indonesia selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berkaitan dengan hal tersebut, *Transparency International Indonesia* (TII) merekomendasikan sembilan poin upaya pemberantasan korupsi. Kesembilan poin tersebut secara khusus menyasar kepada beberapa pihak, seperti pemerintah melalui presiden dan menteri-menterinya, KPK, DPR, partai politik, dan masyarakat umum.

Dari sembilan poin rekomendasi yang ditawarkan, poin kesembilan memiliki arti cukup besar dalam penelitian ini, yakni masyarakat sipil diminta untuk melanjutkan penguatan gerakan sosial melawan korupsi ke berbagai kelompok masyarakat sebagai wujud kontrol warga terhadap pemerintah (Transparency International, 2015).

Fenomena ini dapat menjadi representasi melemahnya karakter bangsa, untuk itu pendidikan karakter dan moral menjadi hal yang sangat penting untuk diajarkan kepada penerus bangsa, agar paradigma tentang pendidikan tidak hanya dipandang sekadar untuk memuaskan ranah kognitif (pikir, nalar, dan logika) saja, tetapi juga memperhatikan dan mengintegrasikan persoalan moral dan budi pekerti di dalamnya.

Berbagai kebijakan dan program telah dibuat sebagai usaha untuk memberantas korupsi. Bahkan pemerintah telah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi yang bertugas melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak

Nike Aditya Putri, 2018

REPRESENTASI PERMASALAHAN SOSIAL DALAM ANTOLOGI PUISI MENOLAK KORUPSI DAN PEMANFAATANNYA SEBAGAI BUKU PENGAYAAN SASTRA DI SMA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pidana korupsi; melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Saat ini KPK menjadi ujung tombak dalam pemberantasan korupsi. Bangsa Indonesia menaruh harapan besar kepada KPK untuk mengakhiri korupsi di Indonesia.

Terkait pemberantasan korupsi di Indonesia, Human Right Watch (2009: 7) dalam risetnya yang berjudul *“Wild Money: The Human Rights Consequences of Illegal Logging and Corruption in Indonesia’s Forestry Sector”* merekomendasikan kepada pemerintah Indonesia untuk *“Reduce illegal logging and associated corruption by enforcing existing forestry laws and anti-money laundering and anti-corruption laws”*. Sebenarnya pendekatan politik dan pendekatan hukum telah dilakukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam pendekatan politik pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan regulasi terkait pemberantasan korupsi sedangkan pendekatan hukum digunakan untuk membawa kasus korupsi ke wilayah hukum. Pendekatan politik tampak mandul dan pendekatan hukum pun tumpul karena berbagai cara digunakan oleh para koruptor dan kroninya untuk terbebas dari hukuman tindak pidana korupsi. Semakin kuat gerakan untuk memberantas korupsi semakin laju pula praktik korupsi.

Selain melalui pendekatan politik dan hukum, korupsi juga dapat diberantas dengan pendekatan kultural. Bahkan pendekatan ini dianggap lebih efektif karena melibatkan partisipasi publik. Merespon fenomena korupsi tersebut, para penyair di Indonesia tidak tinggal diam. Mereka melakukan perlawanan terhadap korupsi melalui gerakan Puisi Menolak Korupsi (PMK). Gerakan ini dipelopori dan dimotori oleh Sosiawan Leak, penyair dari Solo yang sudah sejak Orde Baru sangat gencar menyuarakan kritik-kritik sosial melalui puisi-puisinya. Melalui gerakan ini, para penyair dari berbagai pelosok Nusantara mengungkapkan keresahannya terhadap masalah korupsi melalui puisi yang mereka ciptakan. Sejak dimulai pada 2013 lalu, Gerakan

Nike Aditya Putri, 2018

REPRESENTASI PERMASALAHAN SOSIAL DALAM ANTOLOGI PUISI MENOLAK KORUPSI DAN PEMANFAATANNYA SEBAGAI BUKU PENGAYAAN SASTRA DI SMA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

PMK sudah melahirkan enam jilid buku kumpulan puisi, yakni *Puisi Menolak Korupsi 1*, *Penyair Indonesia Menolak Korupsi 2a*, *Penyair Indonesia Menolak Korupsi 2b*, *Pelajar Indonesia Menggugat*, *Ensiklopedi Koruptor*, *Perempuan Menentang Korupsi*, dan *Membedah Korupsi Kepala Daerah*. Masing-masing kumpulan puisi memiliki motif dan corak tematik yang berbeda-beda.

Para penyair di Indonesia memiliki cara khusus untuk melawan derasnya arus korupsi. Penyair Indonesia melawan korupsi melalui proses kreatifnya dengan cara-cara sastra, yakni dengan menulis puisi yang menolak, mengkritik, dan mencaci-maki perbuatan korupsi dan para koruptor. Untuk menguatkan perang simbolik melawan korupsi, buku antologi tersebut dibuka dengan sebuah pengantar yang disampaikan oleh salah seorang Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto. Perang yang dilakukan penyair Indonesia bersifat simbolik. Artinya perang dilakukan dengan menggunakan bahasa agar aksi korupsi yang dilakukan koruptor dapat diberantas. Kata-kata mempunyai kekuatan dalam merubah perilaku dan pikiran seseorang. Kekuatan kata-kata itu digunakan oleh para penyair Indonesia untuk melawan korupsi, (Junaidi, 2014).

Selain menerbitkan buku antologi, gerakan ini juga melakukan *roadshow* di berbagai kota di Indonesia. Hingga akhir tahun 2017, gerakan ini telah melakukan *roadshow* sebanyak 46 kali, juga beberapa kali pernah dibedah oleh para ahli sastra dan akademisi. Salah satunya oleh Taufik Ismail di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2013 lalu.

Melihat pentingnya peran sastra dalam pendidikan antikorupsi, serta didasari dari hasil wawancara yang peneliti lakukan pada beberapa guru bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa belum tersedianya bahan ajar puisi bertema kritik sosial, dan masih rendahnya pemahaman siswa dalam menganalisis sebuah puisi. Maka, hasil dari penelitian ini peneliti buat dalam sebuah produk berupa buku pengayaan.

Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini yaitu, pertama penelitian yang dilakukan oleh Tatik Inayati

Nike Aditya Putri, 2018

REPRESENTASI PERMASALAHAN SOSIAL DALAM ANTOLOGI PUISI MENOLAK KORUPSI DAN PEMANFAATANNYA SEBAGAI BUKU PENGAYAAN SASTRA DI SMA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

berjudul “Simbol dan Makna pada Puisi Menolak Korupsi Karya Penyair Indonesia” yang dimuat dalam Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Semarang. Simpulan dari penelitian ini yaitu simbol-simbol dalam antologi *Puisi Menolak Korupsi* jilid 1 secara keseluruhan bermakna sebagai bentuk sindiran terhadap para penguasa yang secara cepat memperoleh harta dengan cara korupsi, kolusi, dan nepotisme, kritik terhadap penguasa yang mengatur pendidikan secara tidak benar, gambaran keadaan negara Indonesia dan kondisi rakyat Indonesia yang tidak baik akibat dari korupsi, dan hukuman yang sesuai bagi penguasa yang korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Chafit Ulya berjudul “Metafora dalam Puisi Antikorupsi Karya Penyair Indonesia” yang dimuat dalam Jurnal *ATAVISM* Vol 19, No 2, Edisi Desember 2016 yang diterbitkan oleh Universitas Sebelas Maret. Simpulan dari penelitian ini yaitu bahwa penyair Indonesia sangat membenci perilaku korupsi yang dilakukan oleh para koruptor. Rasa benci atau tidak suka ini diekspresikan melalui ungkapan-ungkapan metaforis di dalam puisinya. Di antara empat kategori metafora yang digunakan, tuturan metafora yang mendominasi dalam puisi antikorupsi adalah metafora kehewanian dan pengabstrakan. Kedua kategori metafora tersebut banyak muncul dalam puisi antikorupsi.

Adapun kesamaan antara penelitian yang akan peneliti lakukan dengan kedua penelitian tersebut terletak pada subjek yang diteliti, yaitu antologi *Puisi Menolak Korupsi*. Namun, perbedaannya adalah pada pisau bedah yang digunakan. Pada penelitian pertama lebih difokuskan pada analisis semiotikanya, pada penelitian yang kedua lebih fokus pada analisis unsur metaforisnya, sedangkan pada penelitian ini lebih fokus pada analisis struktur dan representasinya dalam permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat.

B. Identifikasi Masalah Penelitian

Nike Aditya Putri, 2018

REPRESENTASI PERMASALAHAN SOSIAL DALAM ANTOLOGI PUISI MENOLAK KORUPSI DAN PEMANFAATANNYA SEBAGAI BUKU PENGAYAAN SASTRA DI SMA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Pendidikan antikorupsi belum diajarkan secara khusus dalam sebuah pembelajaran;
2. Masih kurangnya penyediaan bahan ajar karya sastra berupa puisi bertema kritik sosial, terutama tentang antikorupsi;
3. Pengetahuan serta kemampuan siswa dalam memahami dan menganalisis puisi masih terbatas.

C. Batasan Masalah Penelitian

Agar pembahasan terfokus dan tidak terlalu jauh, peneliti hanya akan meneliti ihwal struktur dan unsur sosiologi sastra yang terdapat dalam puisi-puisi karya para penyair Indonesia dalam buku antologi *Puisi Menolak Korupsi* yang bertema Membedah Korupsi Kepala Daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan struktural dan representasi permasalahan sosial untuk kemudian ditelusuri pemanfaatannya sebagai bahan ajar sastra di SMA.

D. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana struktur puisi dalam buku antologi *Puisi Menolak Korupsi* yang bertema membedah korupsi kepala daerah?
2. Bagaimana persoalan sosial direpresentasikan dalam antologi *Puisi Menolak Korupsi*?
3. Bagaimana rancangan buku pengayaan yang dikembangkan dari hasil analisis antologi *Puisi Menolak Korupsi*?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan struktur puisi dalam antologi *Puisi Menolak Korupsi* yang bertema membedah korupsi kepala daerah.

Nike Aditya Putri, 2018

REPRESENTASI PERMASALAHAN SOSIAL DALAM ANTOLOGI PUISI MENOLAK KORUPSI DAN PEMANFAATANNYA SEBAGAI BUKU PENGAYAAN SASTRA DI SMA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

2. Mendeskripsikan persoalan sosial yang direpresentasikan dalam antologi *Puisi Menolak Korupsi*.
3. Mendeskripsikan hasil penelitian dalam antologi *Puisi Menolak Korupsi* yang bertema membedah korupsi kepala daerah untuk dapat dimanfaatkan sebagai alternatif bahan pembelajaran apresiasi sastra.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoretis

Adapun manfaat penelitian ini secara teoretis adalah:

- a. Sebagai sarana peneliti dalam mengaplikasikan teori pengkajian sastra yang dipelajari dalam perkuliahan;
- b. Sebagai sarana dalam memperkaya khazanah penelitian terhadap karya sastra Indonesia
- c. Sebagai sarana dalam memperkaya referensi penelitian terhadap karya sastra dengan pendekatan struktural dan representasi permasalahan sosial;
- d. Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang mempergunakan pendekatan maupun objek penelitian yang sama.

2. Secara Praktis

Selain bermanfaat secara teoritis, penelitian ini juga memiliki manfaat secara praktis. Adapun manfaat tersebut antara lain:

- a. Sebagai sarana memperkaya bahan ajar dalam pembelajaran sastra Indonesia di sekolah;
- b. Sebagai referensi bagi peserta didik dalam mempelajari serta memahami karya sastra khususnya puisi dengan tema antikorupsi;
- c. Sebagai referensi dalam menulis sebuah karya sastra juga melakukan penelitian lainnya